



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Sulawesi Selatan

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI SULAWESI SELATAN	12
1. PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	13
2. KAB. BANTAENG.....	14
3. KAB. BARRU.....	15
4. KAB. BONE.....	16
5. KAB. BULUKUMBA	17
6. KAB. ENREKANG.....	18
7. KAB. GOWA.....	19
8. KAB. JENEPONTO	20
9. KAB. LUWU.....	21
10. KAB. LUWU UTARA	22
11. KAB. MAROS.....	23
12. KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	24
13. KOTA PALOPO	25
14. KAB. LUWU TIMUR.....	26
15. KAB. PINRANG.....	27
16. KAB. SINJAI	28
17. KAB. KEPULAUAN SELAYAR.....	29
18. KAB. SIDENRENG RAPPANG	30
19. KAB. SOPPENG	31
20. KAB. TAKALAR	32
21. KAB. TANA TORAJA	33
22. KAB. WAJO	34
23. KOTA PARE-PARE	35
24. KOTA MAKASSAR	36
25. KAB. TORAJA UTARA	37
TIM PENYUSUN BUKU	38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

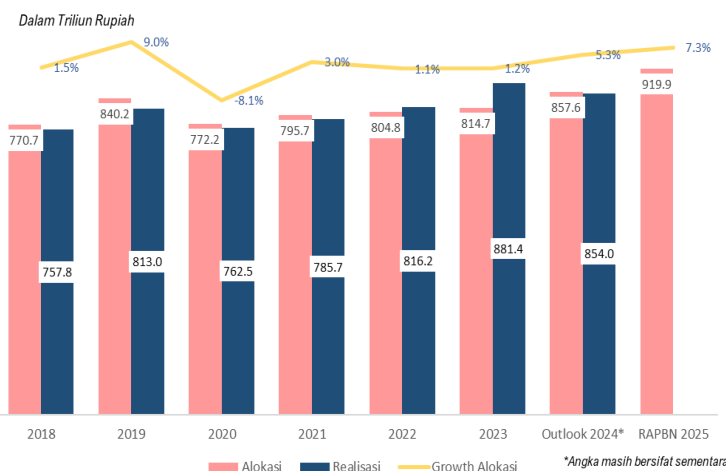


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

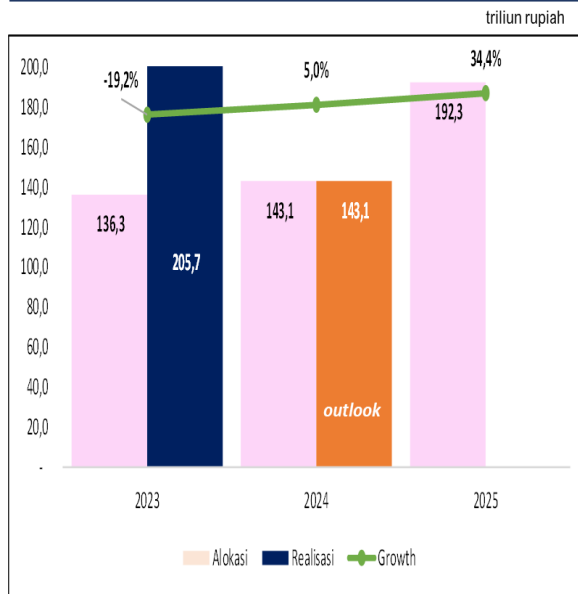
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

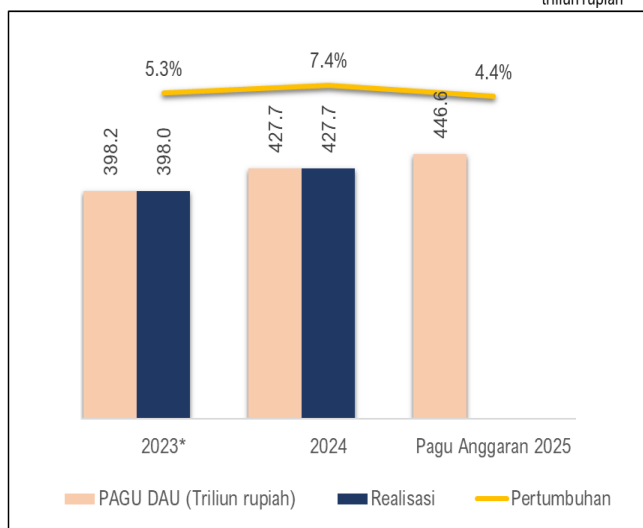


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

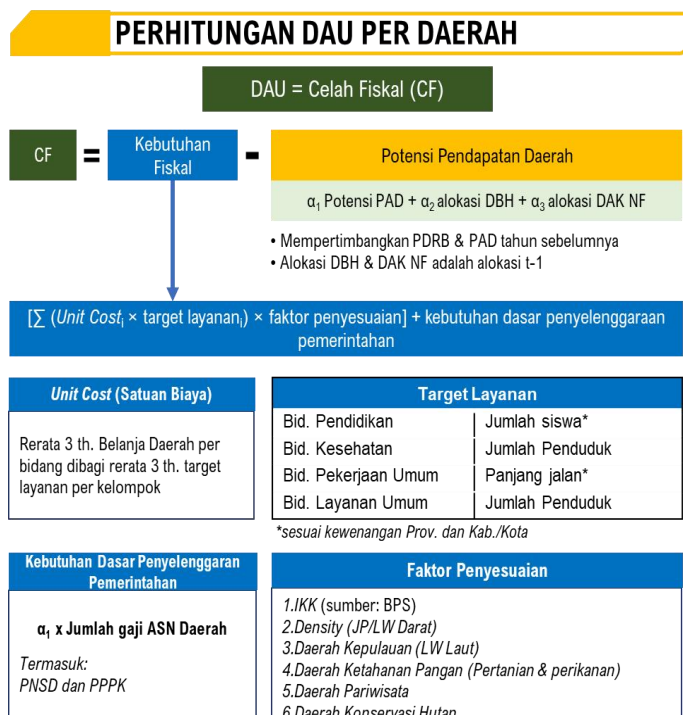
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

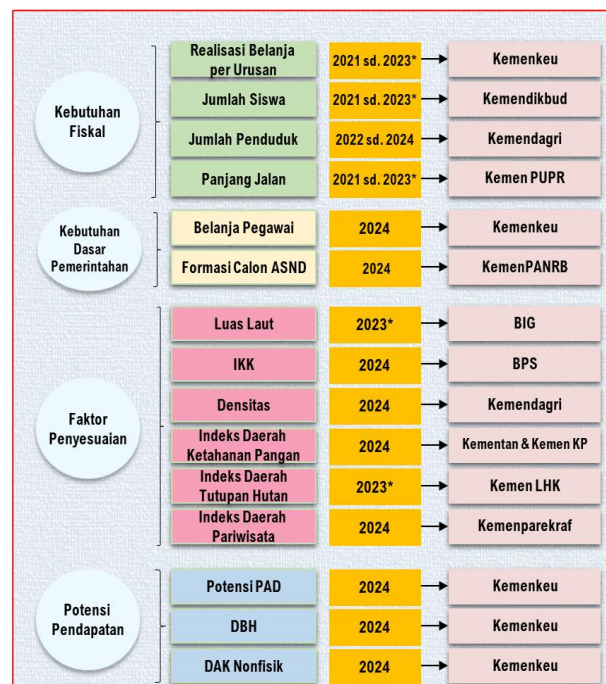
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASD yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggalangan PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

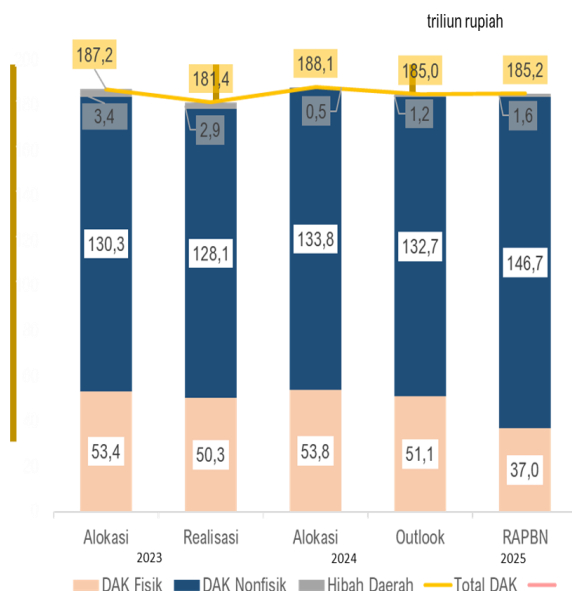
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

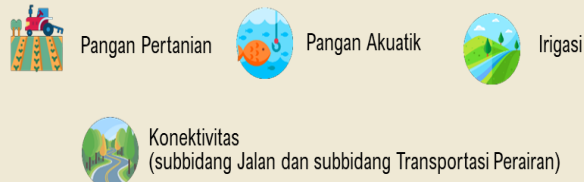
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

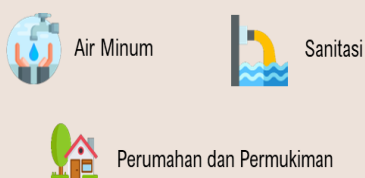
DAK Fisik Layanan Dasar



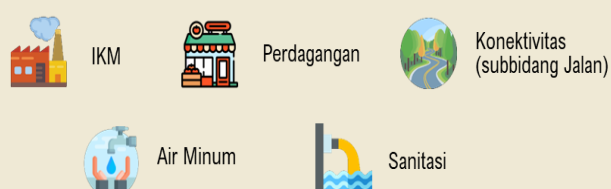
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

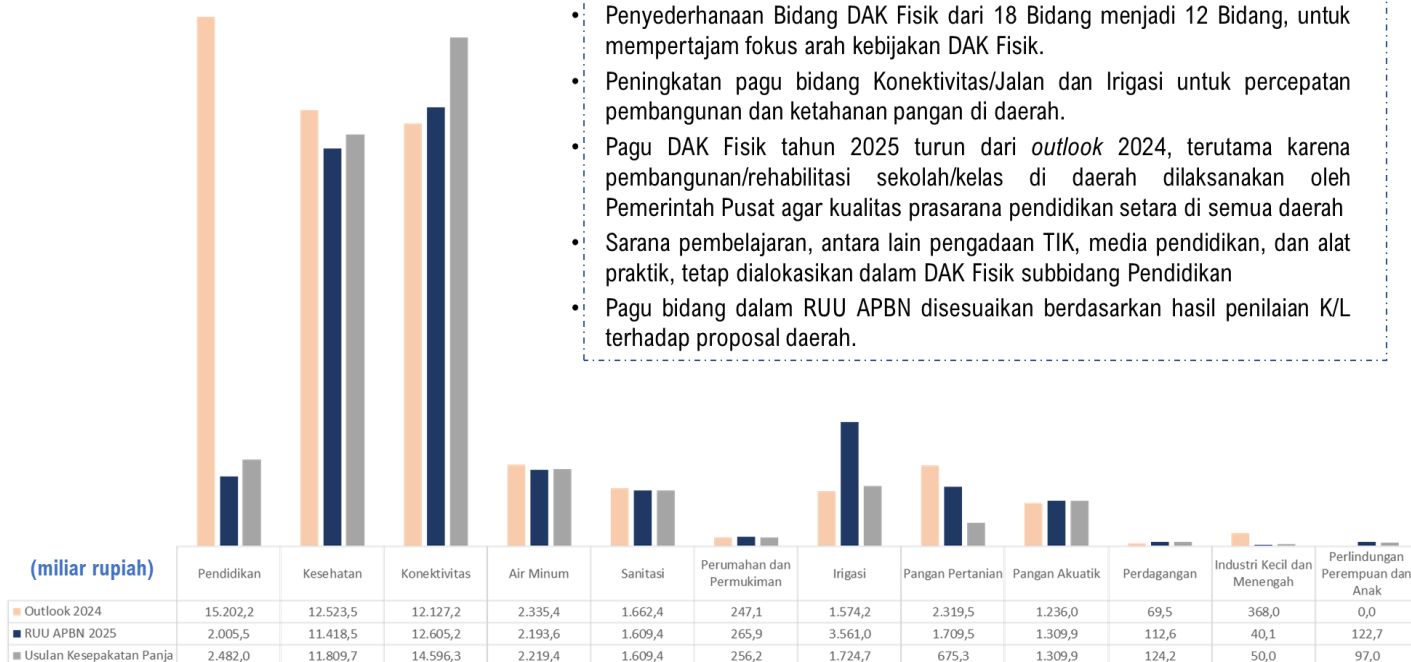


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

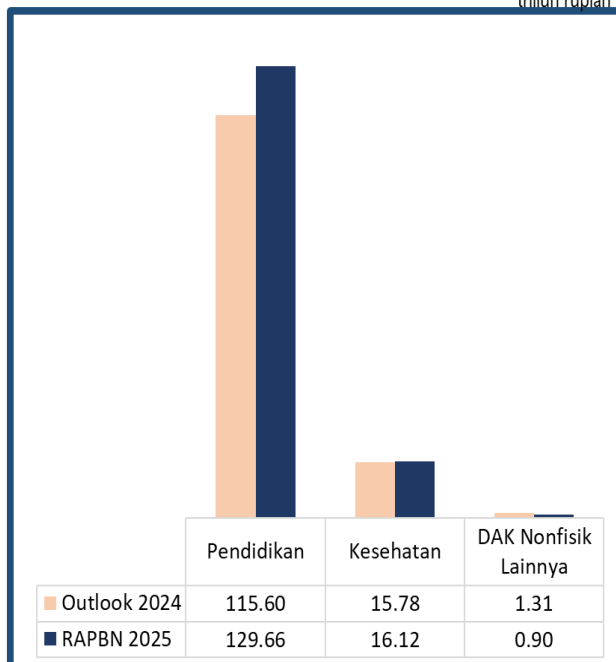
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



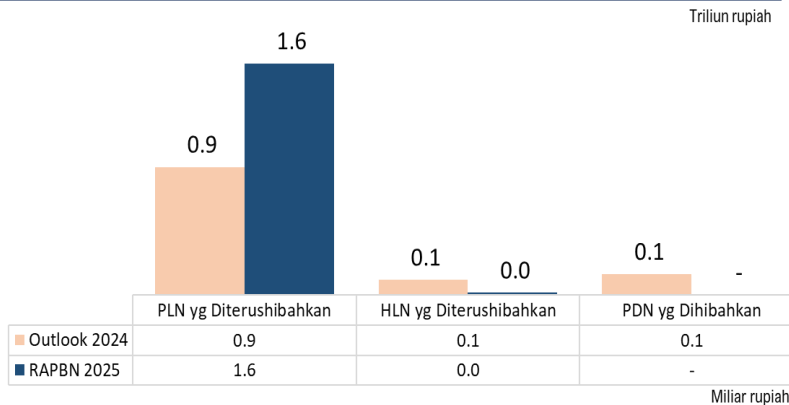
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenian	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASN	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASN	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

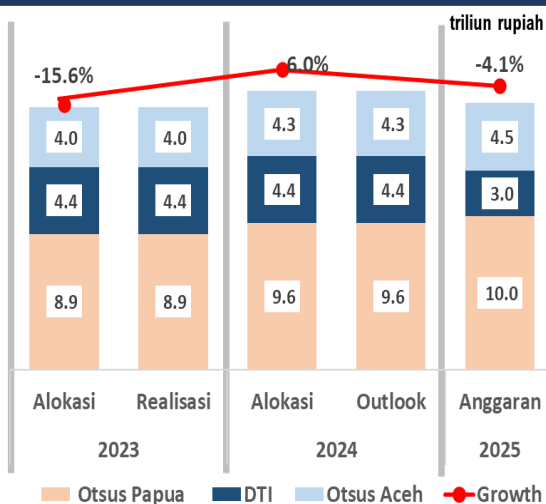


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



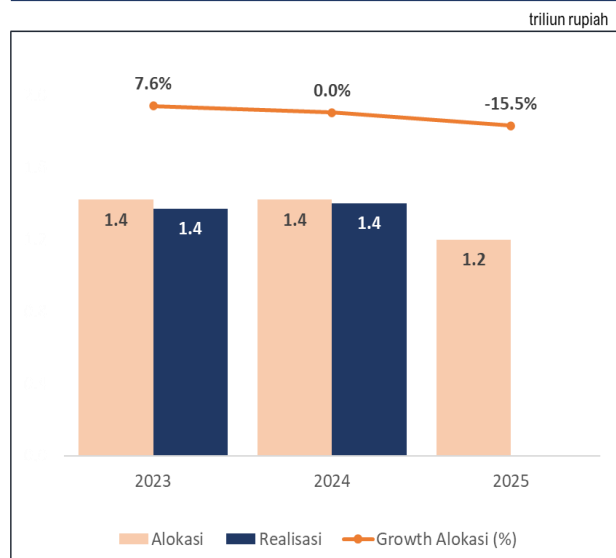
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

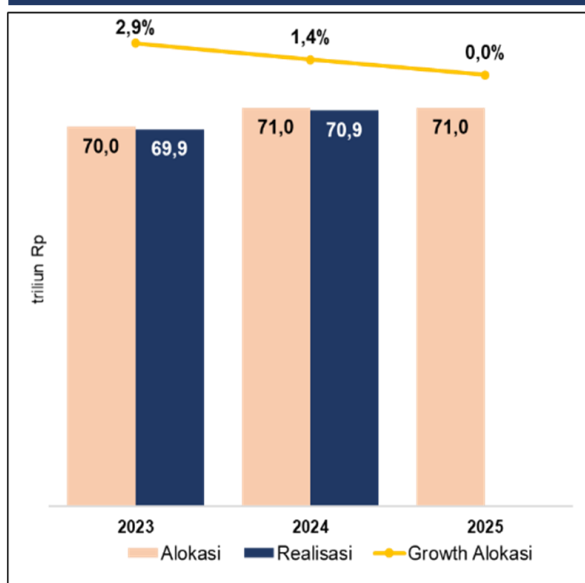
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

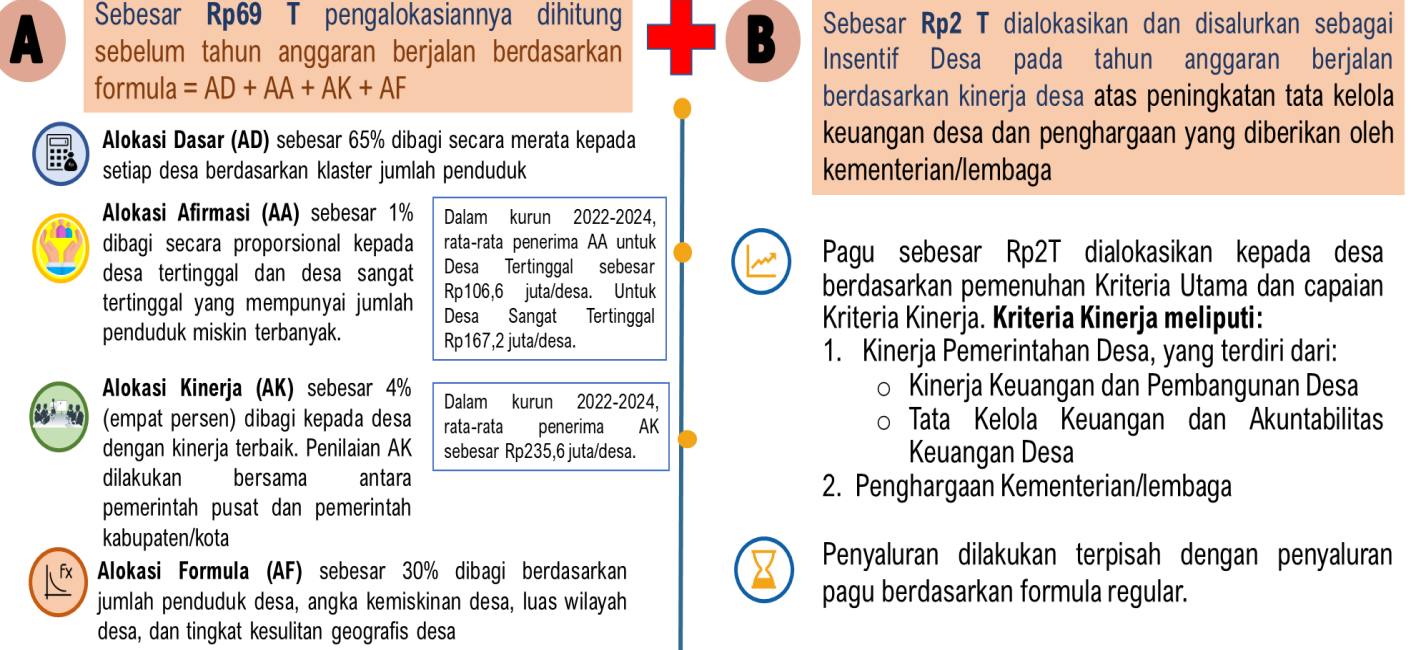
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

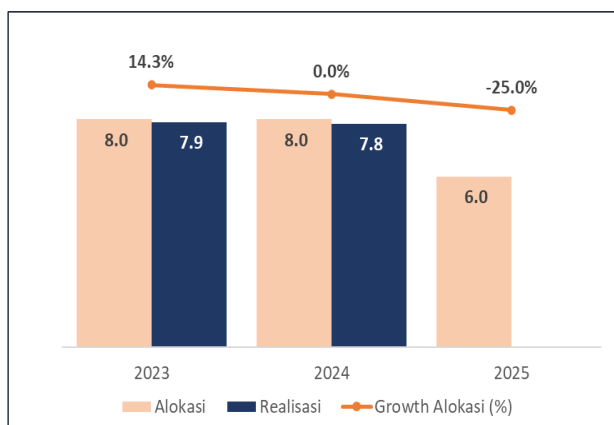
Yang terdiri atas:



PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

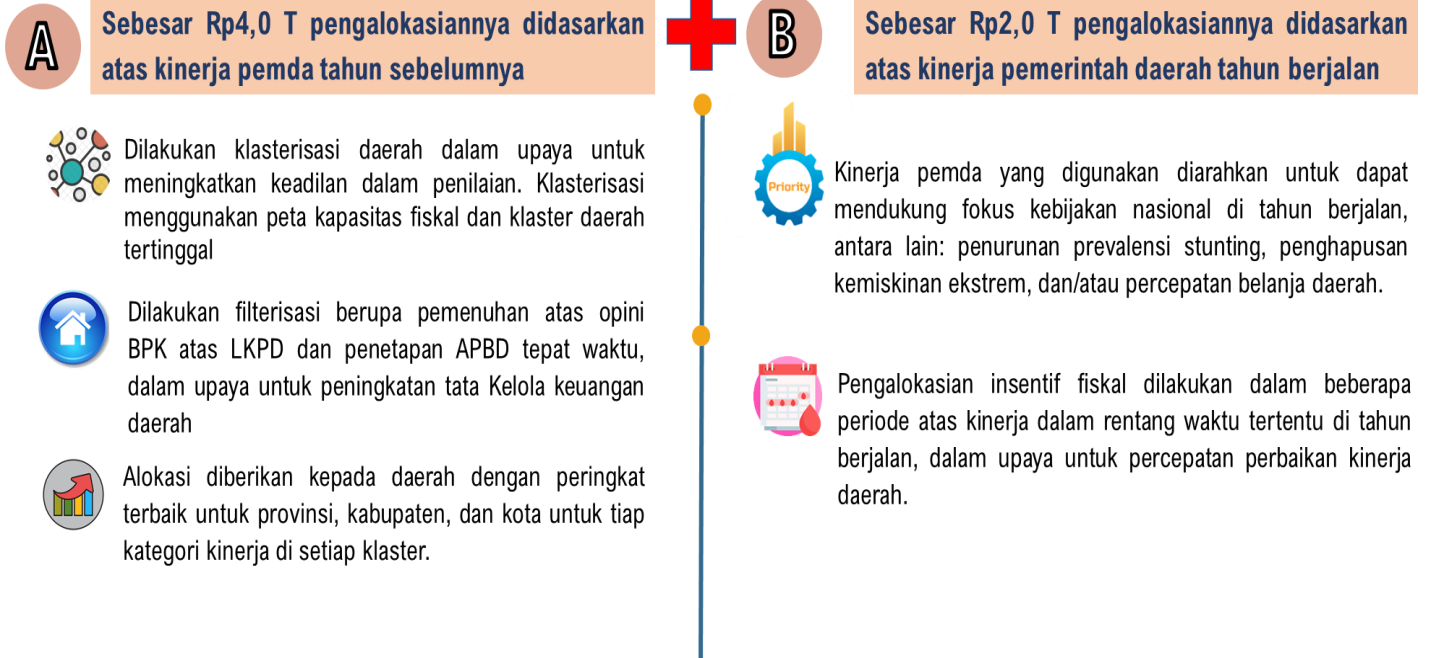
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

- Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
- Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
- Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
- Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
- Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SULAWESI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI SULAWESI SELATAN	323.052.608	2.945.054.955	229.280.816	1.386.008.657	-	30.573.393	4.913.970.429
2	KAB. BANTAENG	12.602.404	524.124.207	10.269.259	133.249.321	41.855.976	8.036.282	730.137.449
3	KAB. BARRU	11.488.447	534.940.002	19.908.934	126.872.718	39.135.404	8.317.131	740.662.636
4	KAB. BONE	27.338.826	1.355.744.622	124.907.557	426.617.649	280.873.923	16.811.049	2.232.293.626
5	KAB. BULUKUMBA	16.583.236	838.294.145	128.167.948	224.585.590	100.880.053	6.764.223	1.315.275.195
6	KAB. ENREKANG	12.297.272	601.718.373	28.751.973	169.577.933	91.682.329	14.387.618	918.415.498
7	KAB. GOWA	16.534.971	1.110.716.715	94.552.824	321.017.726	121.278.081	22.030.352	1.686.130.669
8	KAB. JENEPONTO	12.859.626	753.989.343	17.631.228	192.361.744	79.905.848	-	1.056.747.789
9	KAB. LUWU	16.873.524	806.765.424	64.318.701	229.398.404	173.569.093	7.204.292	1.298.129.438
10	KAB. LUWU UTARA	24.407.321	799.119.265	46.053.557	200.888.194	147.144.463	-	1.217.612.800
11	KAB. MAROS	20.726.618	809.831.841	106.551.829	205.401.864	78.816.740	-	1.221.328.892
12	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	28.795.235	810.945.559	63.468.728	243.308.229	61.893.480	7.111.125	1.215.522.356
13	KOTA PALOPO	15.548.450	535.839.357	47.210.226	94.953.508	-	6.442.293	699.993.834
14	KAB. LUWU TIMUR	229.833.071	636.313.117	78.261.876	161.536.506	112.952.847	6.943.228	1.225.840.645
15	KAB. PINRANG	13.412.186	792.452.048	68.206.332	221.992.302	67.828.544	7.723.545	1.171.614.957
16	KAB. SINJAI	12.326.746	638.108.953	62.195.905	172.035.275	62.273.608	7.933.742	954.874.229
17	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	14.596.497	627.402.639	46.880.888	144.552.020	65.159.887	6.852.700	905.444.631
18	KAB. SIDENRENG RAPPANG	16.408.405	697.691.891	27.313.643	166.719.539	60.822.977	6.994.773	975.951.228
19	KAB. SOPPENG	15.749.969	666.479.526	72.874.916	155.618.545	46.321.303	15.317.134	972.361.393
20	KAB. TAKALAR	18.337.091	658.555.511	19.055.212	173.246.043	76.268.700	8.016.881	953.479.438
21	KAB. TANA TORAJA	11.682.064	639.546.203	48.458.539	183.842.513	98.847.239	-	982.376.558
22	KAB. WAJO	77.483.614	797.295.133	136.643.256	215.359.083	117.475.451	15.641.362	1.359.897.899
23	KOTA PARE-PARE	15.882.757	482.602.060	30.393.380	90.284.880	-	-	619.163.077
24	KOTA MAKASSAR	147.995.387	1.782.112.374	7.216.697	523.889.525	-	-	2.461.213.983
25	KAB. TORAJA UTARA	11.755.335	620.480.137	46.090.160	190.856.278	97.050.349	7.048.676	973.280.935
JUMLAH		1.124.571.660	21.466.123.400	1.624.664.384	6.354.174.046	2.022.036.295	210.149.799	32.801.719.584

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI SULAWESI SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	4.913.970.429
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	323.052.608
1. DBH Pajak	257.278.119
a. Pajak Penghasilan	210.784.610
b. Pajak Bumi dan Bangunan	23.931.373
c. Cukai Hasil Tembakau	22.562.136
2. DBH Sumber Daya Alam	61.698.518
a. Migas	9.666.913
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	51.265.592
c. Kehutanan	766.013
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	4.075.971
a. Perkebunan Sawit	4.075.971
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	2.945.054.955
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	2.254.205.144
2. DAU ditentukan penggunaannya	690.849.811
a. Penggajian Formasi PPPK	288.510.459
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	296.694.299
d. Bidang Kesehatan	80.584.051
e. Bidang Pekerjaan Umum	25.061.002
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.615.289.473
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	229.280.816
a. Pendidikan	66.764.491
b. Kesehatan	75.362.805
c. Konektivitas	18.342.968
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	16.803.341
h. Pangan Pertanian	14.507.211
i. Pangan Akuatik	37.500.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	1.386.008.657
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	580.069.900
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	780.790.738
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	7.590.050
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.605.063
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	199.817
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.095.929
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	150.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	30.573.393

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANTAENG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	730.137.449
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.602.404
1. DBH Pajak	8.894.944
a. Pajak Penghasilan	7.816.905
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.078.039
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.207.460
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.538.244
c. Kehutanan	6.028
d. Perikanan	932.040
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	524.124.207
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	424.054.680
2. DAU ditentukan penggunaannya	100.069.527
a. Penggajian Formasi PPPK	5.087.671
b. Pendanaan Kelurahan	4.200.000
c. Bidang Pendidikan	43.677.380
d. Bidang Kesehatan	32.979.306
e. Bidang Pekerjaan Umum	14.125.170
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	143.518.580
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.269.259
a. Pendidikan	849.944
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	4.355.136
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.064.179
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	133.249.321
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	32.669.190
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	81.843.606
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.672.025
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.214.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	41.855.976
E. Insentif Fiskal	8.036.282

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. BARRU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	740.662.636
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	11.488.447
1. DBH Pajak	7.564.726
a. Pajak Penghasilan	6.523.062
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.041.664
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.423.721
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.562.155
c. Kehutanan	3.846
d. Perikanan	1.126.572
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	534.940.002
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	458.181.500
2. DAU ditentukan penggunaannya	76.758.502
a. Penggajian Formasi PPPK	5.366.448
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	30.072.348
d. Bidang Kesehatan	21.833.013
e. Bidang Pekerjaan Umum	16.486.693
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	146.781.652
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.908.934
a. Pendidikan	535.452
b. Kesehatan	14.318.568
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.453.353
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	3.601.561
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	126.872.718
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	30.819.050
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	76.896.749
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.267.659
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.738.600
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	39.135.404
E. Insentif Fiskal	8.317.131

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BONE

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.232.293.626
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	27.338.826
1. DBH Pajak	18.780.229
a. Pajak Penghasilan	12.060.538
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.719.691
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	7.399.753
a. Migas	4.267.338
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.818.775
c. Kehutanan	9.442
d. Perikanan	1.304.198
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.158.844
a. Perkebunan Sawit	1.158.844
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.355.744.622
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.139.992.706
2. DAU ditentukan penggunaannya	215.751.916
a. Penggajian Formasi PPPK	1.161.569
b. Pendanaan Kelurahan	8.800.000
c. Bidang Pendidikan	106.948.634
d. Bidang Kesehatan	60.652.867
e. Bidang Pekerjaan Umum	38.188.846
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	551.525.206
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	124.907.557
a. Pendidikan	4.820.720
b. Kesehatan	10.374.697
c. Konektivitas	65.326.791
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	12.319.784
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	10.436.044
h. Pangan Pertanian	8.039.333
i. Pangan Akuatik	13.590.188
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	426.617.649
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	105.290.310
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	248.470.185
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	52.694.689
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.291.890
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.719.915
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	280.873.923
E. Insentif Fiskal	16.811.049

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BULUKUMBA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.315.275.195
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	16.583.236
1. DBH Pajak	12.585.894
a. Pajak Penghasilan	8.955.116
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.630.778
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.497.342
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.507.319
c. Kehutanan	3.386
d. Perikanan	1.270.410
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	838.294.145
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	707.122.823
2. DAU ditentukan penggunaannya	131.171.322
a. Penggajian Formasi PPPK	1.672.659
b. Pendanaan Kelurahan	5.400.000
c. Bidang Pendidikan	68.755.351
d. Bidang Kesehatan	36.217.419
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.125.893
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	352.753.538
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.167.948
a. Pendidikan	8.615.229
b. Kesehatan	93.085.764
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.255.285
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	19.211.670
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	224.585.590
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	62.786.600
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	130.900.109
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	23.010.750
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.637.471
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	100.880.053
E. Insentif Fiskal	6.764.223

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. ENREKANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	918.415.498
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.297.272
1. DBH Pajak	8.344.071
a. Pajak Penghasilan	6.316.942
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.027.129
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.126.724
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.538.338
c. Kehutanan	6.062
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	826.477
a. Perkebunan Sawit	826.477
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	601.718.373
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	513.299.821
2. DAU ditentukan penggunaannya	88.418.552
a. Penggajian Formasi PPPK	1.788.816
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	30.662.458
d. Bidang Kesehatan	22.453.462
e. Bidang Pekerjaan Umum	30.113.816
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.329.906
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.751.973
a. Pendidikan	1.294.370
b. Kesehatan	22.767.557
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.690.046
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	169.577.933
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	34.645.447
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	113.725.351
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.616.775
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.439.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	91.682.329
E. Insentif Fiskal	14.387.618

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. GOWA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.686.130.669
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	16.534.971
1. DBH Pajak	12.935.605
a. Pajak Penghasilan	10.745.596
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.190.009
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.099.366
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.509.709
c. Kehutanan	39.625
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.110.716.715
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	946.548.707
2. DAU ditentukan penggunaannya	164.168.008
a. Penggajian Formasi PPPK	-
b. Pendanaan Kelurahan	9.200.000
c. Bidang Pendidikan	94.337.151
d. Bidang Kesehatan	46.930.779
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.700.078
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	415.570.550
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	94.552.824
a. Pendidikan	7.644.099
b. Kesehatan	25.184.194
c. Konektivitas	51.172.722
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.893.058
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.658.751
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	321.017.726
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	113.592.700
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	161.105.519
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	800.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.914.394
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.354.453
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	121.278.081
E. Insentif Fiskal	22.030.352

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. JENEPONTO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.056.747.789
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.859.626
1. DBH Pajak	9.459.591
a. Pajak Penghasilan	7.615.770
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.843.821
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.400.035
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.538.521
c. Kehutanan	5.977
d. Perikanan	1.124.389
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	753.989.343
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	592.864.958
2. DAU ditentukan penggunaannya	161.124.385
a. Penggajian Formasi PPPK	3.949.334
b. Pendanaan Kelurahan	6.200.000
c. Bidang Pendidikan	87.471.558
d. Bidang Kesehatan	48.894.666
e. Bidang Pekerjaan Umum	14.608.827
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	209.992.972
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.631.228
a. Pendidikan	661.680
b. Kesehatan	16.969.548
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	192.361.744
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	57.184.140
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	99.241.364
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.554.540
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.631.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	79.905.848
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LUWU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.298.129.438
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	16.873.524
1. DBH Pajak	8.774.767
a. Pajak Penghasilan	7.394.593
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.380.174
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	7.272.590
a. Migas	4.178.435
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.893.339
c. Kehutanan	7.789
d. Perikanan	1.193.027
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	826.167
a. Perkebunan Sawit	826.167
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	806.765.424
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	620.924.431
2. DAU ditentukan penggunaannya	185.840.993
a. Penggajian Formasi PPPK	21.930.419
b. Pendanaan Kelurahan	4.000.000
c. Bidang Pendidikan	63.349.212
d. Bidang Kesehatan	47.655.724
e. Bidang Pekerjaan Umum	48.905.638
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	293.717.105
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.318.701
a. Pendidikan	3.162.295
b. Kesehatan	12.566.598
c. Konektivitas	37.783.419
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	10.806.389
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	229.398.404
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	62.015.088
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	129.190.756
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.348.632
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.243.928
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	173.569.093
E. Insentif Fiskal	7.204.292

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LUWU UTARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.217.612.800
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	24.407.321
1. DBH Pajak	9.192.701
a. Pajak Penghasilan	7.049.752
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.142.949
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	12.425.699
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	10.606.024
c. Kehutanan	24.380
d. Perikanan	1.064.147
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	2.788.921
a. Perkebunan Sawit	2.788.921
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	799.119.265
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	630.981.623
2. DAU ditentukan penggunaannya	168.137.642
a. Penggajian Formasi PPPK	23.370.764
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	59.564.719
d. Bidang Kesehatan	31.327.762
e. Bidang Pekerjaan Umum	52.474.397
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	246.941.751
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.053.557
a. Pendidikan	3.651.486
b. Kesehatan	16.013.661
c. Konektivitas	23.890.143
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.498.267
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	200.888.194
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	48.736.510
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	121.844.506
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	23.415.287
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.491.231
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	147.144.463
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MAROS

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.221.328.892
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.726.618
1. DBH Pajak	17.061.068
a. Pajak Penghasilan	11.907.516
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.153.552
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.165.550
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.526.651
c. Kehutanan	18.595
d. Perikanan	904.077
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	809.831.841
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	682.685.222
2. DAU ditentukan penggunaannya	127.146.619
a. Penggajian Formasi PPPK	4.646.275
b. Pendanaan Kelurahan	4.600.000
c. Bidang Pendidikan	74.164.481
d. Bidang Kesehatan	32.889.193
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.846.670
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.953.693
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.551.829
a. Pendidikan	2.256.039
b. Kesehatan	26.756.735
c. Konektivitas	47.420.741
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	10.826.696
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.035.618
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	12.256.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	205.401.864
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	66.749.613
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	113.323.494
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	614.190
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.669.207
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.794.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	78.816.740
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.215.522.356
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	28.795.235
1. DBH Pajak	19.460.200
a. Pajak Penghasilan	10.665.834
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.794.366
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	8.835.035
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.549.057
c. Kehutanan	5.101
d. Perikanan	6.564.650
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	810.945.559
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	638.659.603
2. DAU ditentukan penggunaannya	172.285.956
a. Penggajian Formasi PPPK	2.834.228
b. Pendanaan Kelurahan	7.600.000
c. Bidang Pendidikan	77.413.927
d. Bidang Kesehatan	66.928.554
e. Bidang Pekerjaan Umum	17.509.247
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	306.776.957
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.468.728
a. Pendidikan	1.819.821
b. Kesehatan	29.334.983
c. Konektivitas	28.416.628
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.897.296
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	243.308.229
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	62.157.085
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	141.083.911
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.353.136
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.463.900
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	849.537
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	61.893.480
E. Insentif Fiskal	7.111.125

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PALOPO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	699.993.834
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	15.548.450
1. DBH Pajak	11.656.588
a. Pajak Penghasilan	10.635.909
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.020.679
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.079.718
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.506.852
c. Kehutanan	3.673
d. Perikanan	852.966
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	812.144
a. Perkebunan Sawit	812.144
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	535.839.357
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	446.881.435
2. DAU ditentukan penggunaannya	88.957.922
a. Penggajian Formasi PPPK	2.323.138
b. Pendanaan Kelurahan	9.600.000
c. Bidang Pendidikan	48.303.649
d. Bidang Kesehatan	22.227.024
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.504.111
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	142.163.734
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.210.226
a. Pendidikan	11.781.115
b. Kesehatan	4.896.500
c. Konektivitas	18.435.338
d. Air Minum	105.501
e. Sanitasi	4.326.763
f. Perumahan dan Permukiman	5.941.571
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.723.438
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	94.953.508
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	27.869.750
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	49.599.729
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.066.939
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.911.400
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.442.293

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LUWU TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.225.840.645
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	229.833.071
1. DBH Pajak	60.547.614
a. Pajak Penghasilan	25.769.777
b. Pajak Bumi dan Bangunan	34.777.837
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	167.105.076
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	164.901.802
c. Kehutanan	278.427
d. Perikanan	1.193.699
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	2.180.381
a. Perkebunan Sawit	2.180.381
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	636.313.117
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	484.930.845
2. DAU ditentukan penggunaannya	151.382.272
a. Penggajian Formasi PPPK	42.615.636
b. Pendanaan Kelurahan	600.000
c. Bidang Pendidikan	33.283.421
d. Bidang Kesehatan	22.810.739
e. Bidang Pekerjaan Umum	52.072.476
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.798.382
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.261.876
a. Pendidikan	2.427.457
b. Kesehatan	38.555.370
c. Konektivitas	29.080.696
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.909.199
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.289.154
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	161.536.506
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	54.122.460
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	83.890.140
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.623.471
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.499.775
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	112.952.847
E. Insentif Fiskal	6.943.228

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. PINRANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.171.614.957
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	13.412.186
1. DBH Pajak	9.226.125
a. Pajak Penghasilan	7.919.624
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.306.501
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.358.018
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.512.196
c. Kehutanan	4.852
d. Perikanan	1.124.743
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	828.043
a. Perkebunan Sawit	828.043
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	792.452.048
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	678.929.211
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.522.837
a. Penggajian Formasi PPPK	7.550.197
b. Pendanaan Kelurahan	8.000.000
c. Bidang Pendidikan	68.557.836
d. Bidang Kesehatan	17.606.391
e. Bidang Pekerjaan Umum	11.808.413
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	290.198.634
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.206.332
a. Pendidikan	2.254.020
b. Kesehatan	31.284.457
c. Konektivitas	25.398.106
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.788.695
h. Pangan Pertanian	7.481.054
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	221.992.302
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	62.823.195
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	119.758.238
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.293.779
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.534.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.332.230
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	67.828.544
E. Insentif Fiskal	7.723.545

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. SINJAI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	954.874.229
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	12.326.746
1. DBH Pajak	7.781.928
a. Pajak Penghasilan	6.675.823
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.106.105
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.384.126
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.538.708
c. Kehutanan	6.508
d. Perikanan	1.107.762
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.160.692
a. Perkebunan Sawit	1.160.692
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	638.108.953
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	538.227.396
2. DAU ditentukan penggunaannya	99.881.557
a. Penggajian Formasi PPPK	-
b. Pendanaan Kelurahan	2.600.000
c. Bidang Pendidikan	35.533.123
d. Bidang Kesehatan	37.454.520
e. Bidang Pekerjaan Umum	24.293.914
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.231.180
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.195.905
a. Pendidikan	3.077.343
b. Kesehatan	27.992.539
c. Konektivitas	31.126.023
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	172.035.275
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	44.108.718
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	102.561.341
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	20.374.795
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.089.761
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	62.273.608
E. Insentif Fiskal	7.933.742

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KEPULAUAN SELAYAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	905.444.631
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	14.596.497
1. DBH Pajak	6.837.551
a. Pajak Penghasilan	5.722.129
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.115.422
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	7.758.946
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.507.037
c. Kehutanan	3.336
d. Perikanan	5.532.346
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	627.402.639
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	494.221.532
2. DAU ditentukan penggunaannya	133.181.107
a. Penggajian Formasi PPPK	1.858.510
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	50.767.542
d. Bidang Kesehatan	35.201.688
e. Bidang Pekerjaan Umum	43.953.367
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	191.432.908
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.880.888
a. Pendidikan	1.168.593
b. Kesehatan	6.647.411
c. Konektivitas	29.064.884
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	10.000.000
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	144.552.020
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	30.362.760
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	84.627.539
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	800.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.864.991
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.896.730
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	65.159.887
E. Insentif Fiskal	6.852.700

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SIDENRENG RAPPANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	975.951.228
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	16.408.405
1. DBH Pajak	8.984.180
a. Pajak Penghasilan	7.581.563
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.402.617
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	6.615.334
a. Migas	4.267.338
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.509.954
c. Kehutanan	4.237
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	808.891
a. Perkebunan Sawit	808.891
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	697.691.891
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	574.331.727
2. DAU ditentukan penggunaannya	123.360.164
a. Penggajian Formasi PPPK	8.014.825
b. Pendanaan Kelurahan	7.600.000
c. Bidang Pendidikan	60.600.250
d. Bidang Kesehatan	29.028.418
e. Bidang Pekerjaan Umum	18.116.671
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	194.033.182
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.313.643
a. Pendidikan	589.765
b. Kesehatan	7.683.713
c. Konektivitas	10.858.016
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	4.617.263
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.564.886
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	166.719.539
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	47.792.200
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	96.441.122
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.301.416
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.584.801
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	60.822.977
E. Insentif Fiskal	6.994.773

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SOPPENG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	972.361.393
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	15.749.969
1. DBH Pajak	8.311.794
a. Pajak Penghasilan	6.914.357
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.397.437
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	6.612.696
a. Migas	4.267.338
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.506.852
c. Kehutanan	4.701
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	825.479
a. Perkebunan Sawit	825.479
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	666.479.526
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	579.228.227
2. DAU ditentukan penggunaannya	87.251.299
a. Penggajian Formasi PPPK	-
b. Pendanaan Kelurahan	4.200.000
c. Bidang Pendidikan	30.980.698
d. Bidang Kesehatan	27.922.738
e. Bidang Pekerjaan Umum	24.147.863
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	228.493.461
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.874.916
a. Pendidikan	428.897
b. Kesehatan	20.275.477
c. Konektivitas	42.603.101
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.523.181
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.447.647
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.596.613
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	155.618.545
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	31.105.370
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	104.255.813
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.263.088
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.638.584
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	46.321.303
E. Insentif Fiskal	15.317.134

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TAKALAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	953.479.438
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.337.091
1. DBH Pajak	14.773.683
a. Pajak Penghasilan	7.172.313
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.601.370
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.563.408
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.506.852
c. Kehutanan	5.855
d. Perikanan	1.334.474
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	658.555.511
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	544.131.321
2. DAU ditentukan penggunaannya	114.424.190
a. Penggajian Formasi PPPK	1.393.883
b. Pendanaan Kelurahan	4.800.000
c. Bidang Pendidikan	59.599.842
d. Bidang Kesehatan	41.765.680
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.864.785
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.301.255
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.055.212
a. Pendidikan	3.029.370
b. Kesehatan	2.018.020
c. Konektivitas	6.224.828
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.547.140
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.235.854
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	173.246.043
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	54.104.100
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	80.424.517
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.590.917
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.725.849
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	76.268.700
E. Insentif Fiskal	8.016.881

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TANA TORAJA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	982.376.558
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	11.682.064
1. DBH Pajak	7.873.764
a. Pajak Penghasilan	6.485.840
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.387.924
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.308.300
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.717.756
c. Kehutanan	8.220
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	639.546.203
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	494.817.485
2. DAU ditentukan penggunaannya	144.728.718
a. Penggajian Formasi PPPK	16.331.657
b. Pendanaan Kelurahan	9.400.000
c. Bidang Pendidikan	56.796.739
d. Bidang Kesehatan	24.218.497
e. Bidang Pekerjaan Umum	37.981.825
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	232.301.052
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.458.539
a. Pendidikan	2.169.488
b. Kesehatan	24.628.165
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	8.334.132
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	13.326.754
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	183.842.513
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	49.565.419
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	98.230.703
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.146.791
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.999.994
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	498.946
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	98.847.239
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. WAJO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.359.897.899
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	77.483.614
1. DBH Pajak	41.096.673
a. Pajak Penghasilan	8.412.544
b. Pajak Bumi dan Bangunan	32.684.129
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	34.755.205
a. Migas	32.058.638
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.507.333
c. Kehutanan	3.920
d. Perikanan	1.185.314
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.631.736
a. Perkebunan Sawit	1.631.736
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	797.295.133
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	639.379.691
2. DAU ditentukan penggunaannya	157.915.442
a. Penggajian Formasi PPPK	13.125.727
b. Pendanaan Kelurahan	9.600.000
c. Bidang Pendidikan	65.330.728
d. Bidang Kesehatan	51.694.420
e. Bidang Pekerjaan Umum	18.164.567
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	352.002.339
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	136.643.256
a. Pendidikan	5.963.841
b. Kesehatan	59.974.271
c. Konektivitas	57.694.399
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.745.337
h. Pangan Pertanian	9.265.408
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	215.359.083
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	54.557.480
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	116.546.007
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.617.336
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.237.600
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	117.475.451
E. Insentif Fiskal	15.641.362

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PARE-PARE

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	619.163.077
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	15.882.757
1. DBH Pajak	12.315.839
a. Pajak Penghasilan	11.279.185
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.036.654
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.066.918
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.506.852
c. Kehutanan	3.402
d. Perikanan	840.437
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	482.602.060
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	385.466.105
2. DAU ditentukan penggunaannya	97.135.955
a. Penggajian Formasi PPPK	21.038.334
b. Pendanaan Kelurahan	4.400.000
c. Bidang Pendidikan	43.050.436
d. Bidang Kesehatan	21.151.420
e. Bidang Pekerjaan Umum	7.495.765
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	120.678.260
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.393.380
a. Pendidikan	374.816
b. Kesehatan	8.622.100
c. Konektivitas	21.396.464
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	90.284.880
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	24.419.040
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	53.913.833
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.328.259
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.118.058
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA MAKASSAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.461.213.983
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	147.995.387
1. DBH Pajak	144.439.744
a. Pajak Penghasilan	142.727.105
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.712.639
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.555.643
a. Migas	716.227
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.506.852
c. Kehutanan	7.466
d. Perikanan	1.325.098
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.782.112.374
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.498.813.271
2. DAU ditentukan penggunaannya	283.299.103
a. Penggajian Formasi PPPK	49.180.823
b. Pendanaan Kelurahan	30.600.000
c. Bidang Pendidikan	162.353.099
d. Bidang Kesehatan	41.165.181
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	531.106.222
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7.216.697
a. Pendidikan	674.959
b. Kesehatan	3.899.750
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	2.641.988
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	523.889.525
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	203.624.800
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	264.926.246
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.200.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	43.972.954
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.659.835
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TORAJA UTARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	973.280.935
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	11.755.335
1. DBH Pajak	7.950.805
a. Pajak Penghasilan	6.647.226
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.303.579
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	3.219.646
a. Migas	731.148
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.632.796
c. Kehutanan	4.526
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	584.884
a. Perkebunan Sawit	584.884
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	620.480.137
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	487.373.557
2. DAU ditentukan penggunaannya	133.106.580
a. Penggajian Formasi PPPK	38.029.763
b. Pendanaan Kelurahan	8.000.000
c. Bidang Pendidikan	41.066.543
d. Bidang Kesehatan	25.067.759
e. Bidang Pekerjaan Umum	20.942.515
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	236.946.438
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.090.160
a. Pendidikan	1.439.570
b. Kesehatan	16.258.087
c. Konektivitas	25.661.957
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.730.546
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	190.856.278
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	48.337.416
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	101.233.619
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	381.825
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.127.418
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.276.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	97.050.349
E. Insentif Fiskal	7.048.676

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

